

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. 2016. *Perpajakan*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul, Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Agoes, Sukrisno. (2014). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi ke 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Akuntansi Dewantara*, 1(2), 174-187.
- Broto, S. S. (2018). *Apakah Akuntabilitas Pemerintah dan Reformasi Administrasi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia? Jurnal Widyaiswara Nasional 1*. 1(2), 76-92.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, Jakarta.
- Detiyani, Depi. 2014. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencapaian Akuntabilitas Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Studi Kasus Di Kpp Pratama Muara Teweh*. Online. https://repository.usd.ac.id/17540/2/102114023_full.pdf.
- Hermadani, Ade Puja. 2021. *Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya*. Online. <https://eprints.perbanas.ac.id/8321/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Ist ed.)*. Jakarta.
- Hans Kartihadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFSR Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Insani, Layla Nur. Et.al. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas*

Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Cikokol Kota Tangerang). Akuntansi Responsibilitas Audit dan Tax, [S.l.], v. 1, n. 01, feb. 2018. ISSN 2252-6226. Available at: <<https://jom.fe.budiluhur.ac.id/index.php/jma/article/view/82>>.

Kantor Pelayanan Pajak Ciamis, 2023. *Annual Report 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2024*.

Kartikahadi, H. dkk. 2019. *Buku 1 Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Cetakan Kedua. Ikatan Akuntan Indonesia.

Kurniawan, I. 2018. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*. Jurnal Ekobis Dewantara, 1(3), 1–11.

L.M Samryn, 2015. *Pengantar Akuntansi, Buku I, Edisi IFRS*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Lilisen, Ratnawati, V., & Indrawati, N. (2018). *The Effect of The Taxation System, Accountability and Examination Risk to The Taxpayer Compliance with Taxpayer Morale as A Moderating Variable*. PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis). 10(2), 103-117

Lukito Penny Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Nelly Prima Putri, Aries Tanno dan Rahmat Kurniawan. 2019. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Benefita 4(2) Juli 2019 (386-398) LLDIKTI Wilayah X 386. Online diakses pada tanggal 20 maret 2023. Retrieved at: <https://pdfs.semanticscholar.org>

Ni Komang Fera Trisnayanti, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati. 2022. *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Mardiasmo.2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 39/PMK.03/2018 pasal 3 ayat 2. Mengenai Wajib Pajak kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Prabawati, Y. T. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. STIE Perbanas Surabaya. 1-20
- Qodariah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X Di Jawa Barat)*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 84-108
- Rijal Djalil. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBOOKS, PT. Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI
- S. I. Djajadiningrat. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi dan Studi Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Sarunan, W. K. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado*. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518-526
- Siti Kurnia Rahayu. 2014. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Siti Resmi, 2017, *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Soemarso. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2017. *Statistika: Untuk Penelitian*, Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung.
- _____. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung.
- _____. 2022. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung
- Susilowati. Lantip. 2015. *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. Yogyakarta: Kalimasada,
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*, Cetakan 1. Jakarta: Indeks
- Samryn, 2015. *Pengantar Akuntansi*, Buku I, Edisi IFRS, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah.
- Waluyo. 2014. *Ekonomi dan Administrasi*. Palembang: Salemba Empat.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E., Suhardianto, N., Kalanjati, D.S., Jusuf, A.A., Djakman, C.D., 2015. *Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, diterjemahkan oleh Norvys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati.